KPK RI Minta Pemprov Jatim Tingkatkan Pengawasan Pengadaan Barang Jasa, Penganggaran dan Perizinan



Rabu, 18 Desember 2024

KPK RI mengidentifikasi tiga area rawan korupsi di Jawa Timur: pengadaan barang/jasa, perencanaan/penganggaran, dan perizinan. Pengadaan barang/jasa menjadi sektor paling bermasalah.

Luasnya wilayah Jawa Timur dan besarnya anggaran, baik dari pusat maupun daerah, meningkatkan potensi korupsi. Banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus korupsi memperkuat hal ini.

KPK merekomendasikan peningkatan pengawasan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim. Fungsi pengawasan dinilai belum optimal, membuka celah korupsi.

Pemprov Jatim telah berupaya melalui transformasi digital, menerapkan sistem online untuk layanan publik dan pemerintahan. E-commerce dan e-catalog menjadi contoh upayanya.

Pj Gubernur Jatim menekankan pentingnya kepemimpinan yang memberikan contoh dan komitmen kepala daerah untuk mencegah korupsi di jajarannya, dimulai dari hal kecil.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.